

REVOLUSI KEMERDEKAAN, NILAI-NILAI KEJUANGAN, DAN INTEGRASI NASIONAL: SEBUAH REFLEKSI HISTORIS

Oleh: Andi Suwirta ^{*)}

SALAH satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia adalah terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa itu penting karena dengan proklamasi telah mengubah keadaan dan struktur politik di Indonesia, paling tidak, dari bangsa yang “dijajah” menjadi bangsa yang bestatus “merdeka”.

Akan tetapi perjuangan untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dan sekaligus mempertahankannya ternyata bukanlah persoalan yang mudah. Karena itu diperlukan peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu dan berjuang mempertahankan kemerdekaan itu selama kurang lebih lima tahun. Suatu fase penting dalam sejarah Indonesia, yang kemudian terkenal dengan sebutan “masa revolusi kemerdekaan” yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai perjuangan dan kepahlawanan.

Revolusi, Dialektika, dan Integrasi

Sementara itu, kalau mau dikaji secara akademis, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa revolusi Indonesia itu sendiri juga menarik, karena tidak menunjukkan pola dan struktur yang seragam. Sebagaimana dicatat oleh

^{*)}**Drs. Andi Suwirta, M.Hum.** adalah Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung.

Ricklefs,¹⁾ bahwa keragaman dan perbedaan itu tampak antara: kekuatan perjuangan bersenjata dengan perjuangan diplomasi, antara perlunya revolusi sosial dengan mereka yang menentangnya, antara generasi muda dengan generasi tua, antara golongan kanan dengan golongan kiri, antara kekuatan-kekuatan Islam dengan kekuatan sekuler, dan sebagainya.

Bahkan menurut almarhum Soedjatmoko, salah seorang pelaku dan saksi sejarah dalam revolusi, perbedaan-perbedaan itu juga nampak di antara para pemimpin nasional sendiri, terutama dalam memahami dan memaknai “konsep tentang revolusi”, sebagaimana terlihat dalam pemikiran Sutan Sjahrir dan Soekarno misalnya.²⁾

Walaupun para pemimpin nasional itu menyadari (termasuk Sutan Sjahrir dan Soekarno), bahwa sebuah revolusi merupakan proses pembebasan yang dahsyat dari kekuatan-kekuatan masyarakat dan suatu akselerasi sejarah dengan disertai emosi yang berapi-api, tetapi dalam hal: bagaimana posisi dan peran seorang pemimpin nasional, masih terdapat perbedaan visi dan interpretasi.

Bagi Sutan Sjahrir – sebagaimana diungkapkan dalam brosurinya yang terkenal, *Perdjoeangan Kita* – bahwa kekuatan-kekuatan dahsyat dalam revolusi itu akan mengandung dua potensi yang – kalau tidak diarahkan dengan baik – akan saling menegasikan, yaitu: antara kekuatan kreatif dan kekuatan destruktif. Adalah menjadi tugas seorang pemimpin nasional, kata Sjahrir, untuk menggalang kekuatan-kekuatan itu dan mengarahkannya kepada tujuan demokratis dan humanistik, melalui pranata-pranata demokrasi dan juga melalui suatu perjuangan melawan dampak indoktrinasi fasis-militer warisan Jepang, serta budaya feodalistik yang sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia.³⁾

¹⁾M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Terjemahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 317-18.

²⁾Soedjatmoko, “Pilihan dan Peluang: Revolusi Indonesia Setelah 45 tahun, Beberapa Refleksi Pribadi” dalam *Sejarah*, No.1 (Jakarta: PT Gramedia – MSI, 1991).

³⁾Sutan Sjahrir, *Our Struggle*, Terjemahan dan Kata Pengantar oleh Benedict R.O’G. Anderson (New York, Ithaca: Cornell University, 1968), hlm. 28-29.

Sementara itu dalam pandangan Soekarno, adalah terlalu dini dan mewah untuk memikirkan masalah demokrasi dan hak-hak asasi manusia selama dalam masa revolusi yang genting ini. Lagi pula dalam analognya Soekarno melihat bahwa revolusi itu bagaikan kuda liar yang terlepas dan lari mencari jalannya sendiri. Adalah tugas seorang pemimpin, kata Soekarno, untuk berusaha tetap duduk di atas pelana (atau malah terlempar sama sekali sebagai resiko dalam sebuah revolusi), sampai kuda itu lelah berlari. Baru sesudah itu, ia bisa menggiringnya ke arah yang dikehendaki.

Perbedaan-perbedaan yang digambarkan di atas, sebenarnya lebih merupakan dialektika internal yang dinamis dalam sebuah revolusi yang demikian rumit dan kompleks. Dialektika dan dinamika seperti itu tampaknya mustahil bisa dipersatukan, kecuali sepanjang ada kesepakatan tentang: perlunya persatuan dan perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan, serta adanya tokoh dwitunggal sebagai faktor yang memperkuat integrasi nasional.

Karena itu tidaklah mengherankan, kalau selama fase revolusi yang penting itu banyak menampilkan pola dan struktur kejadian yang beragam, penuh vitalitas, spontan, sikap-sikap oposisional, dan bahkan konflik yang berkepanjangan, tetapi tetap dalam kerangka integrasi sebagai negara bangsa (*nation state*) yang baru lahir. Hanya dalam konteks “konflik-integrasi” inilah, kita bisa memahami dinamika revolusi Indonesia itu dalam perspektif yang lebih menarik, kaya, dan bernuansa.

Sejarah Indonesia dan Integrasi Nasional

Dalam kajian sejarah Indonesia, konsep tentang “integrasi” ini dikemukakan secara konsisten oleh Sartono Kartodirdjo.⁴⁾ Menurut sejarawan dari UGM ini, usaha untuk merekonstruksi peristiwa sejarah harus dipandang sebagai suatu keseluruhan masyarakat Indonesia yang integral. Konsep

⁴⁾Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: Dari Emporium sampai Imperium, Jilid I* (Jakarta: PT Gramedia, 1987).

tentang “integrasi” ini untuk menunjukkan bahwa sejarah nasional Indonesia yang menyeluruh, tidaklah identik dengan jumlah dari semua sejarah lokal dan regional. Tetapi sejarah “integral” adalah: konsep kesatuan yang mencakup pelbagai unsur, dimensi dan elemen dalam masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi dan berinteraksi (baik secara persuasif, akomodatif, maupun antagonistik) untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dirinya sebagai suatu bangsa yang utuh. Dari proses integrasi inilah, bangsa Indonesia memiliki ciri dan justifikasi khas dalam perkembangan sejarahnya, yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain.⁵⁾

Kalau berbicara tentang “integrasi”, maka secara filosofis dan dialektika, tidak bisa dilepaskan pula dari adanya “disintegrasi”. Fenomena menguatnya integrasi dan posisi negara (*state*) *vis a vis* masyarakat (*society*) pada masa Orde Baru misalnya, tidak luput dari proses disintegrasi yang terjadi pada tahap-tahap perkembangan sebelumnya. Struktur dan realita disintegrasi itu terlihat: tidak saja dari adanya pluralisme kekuatan sosial-politik yang kronis, antagonisme antara “pusat” dan “daerah” yang akut, tetapi juga – yang lebih penting – pada adanya visi dan interpretasi yang diametral diantara para pemimpin nasional sendiri, yaitu: apakah revolusi itu sudah selesai (*the end of revolution*) atau belum selesai (*the permanent of revolution*).

Puncak dari disintegrasi nasional itu terjadi pada pertengahan tahun 1960-an, ketika kekuatan komunisme di Indonesia melakukan “makar politik” yang begitu vulgar dan destruktif. Setelah kekuatan komunisme dieliminir sampai ke akar-akarnya, maka pemerintah Orde Baru – sebagai antithesa dari pemerintah Orde Lama – mulai mengkonsentrasikan diri pada “pembangunan ekonomi” yang terencana dan berkelanjutan. Orientasi dan wacana ide-ide baru tentang modernisasi kemudian semakin kuat, bersamaan dengan menguatnya arus kepentingan kelompok elite-strategis untuk mengaktualisasikan kredo: *Politik, No ! Pembangunan, Yes !*

⁵⁾Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia, Suatu Alternatif* (Jakarta: PT Gramedia, 1982), hlm.29-43.

Akan tetapi ketika sampai pada tataran strategi pembangunan yang lebih berwawasan kebangsaan, para elite-strategis pada masa Orde Baru juga mengalami friksi, karena adanya perbedaan visi dan interpretasi terhadap pembangunan. Perbedaan-perbedaan itu tampak: antara mereka yang menginginkan pembangunan lebih berorientasi pada “pertumbuhan” dengan mereka yang berorientasi pada “pemerataan”; antara perlunya pendekatan sekuriti untuk menjamin stabilisasi dengan pendekatan kesejahteraan yang lebih manusiawi, demokratis, dan egalitarian; antara kelompok teknokrat yang *economic oriented* dengan teknokrat yang *technology oriented*; dan – belakangan yang lebih santer – antara mereka yang mendambakan impelementasi HAM secara “universal” dengan yang “partikular”.

Begitu juga ketika pemerintah Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh mahasiswa dan kekuatan oposisi lainnya pada tahun 1998, perdebatan apakah perubahan social secara radikal di Indonesia ini perlu dilakukan dengan jalan “reformasi” atau “revolusi” kembali menyeruak ke permukaan. Betapapun kekuatan yang menghendaki jalan “reformasi” lebih dominan, tetapi wacana-wacana kritis tentang perlunya pemerintahan yang demokratis, transparan, tidak korup, tegaknya supremasi hukum, kebebasan pers, pendidikan yang murah, dan sebagainya terus diusung sebagai harapan dan cita-cita bersama masyarakat Indonesia.

Penutup

Melihat kenyataan seperti itu – sebagaimana terefleksikan dalam dinamika perkembangan sejarah sebelumnya – hendaknya dikaji dan dicermati dalam perspektif yang lebih sehat dan wajar. Sepanjang masih adanya komitmen kebangsaan yang tak terbantahkan di antara mereka dan – yang lebih penting – adanya figur sentral yang bisa memperkuat proses integrasi nasional, maka dialektika internal yang dinamis itu harus dimanfaatkan sebagai kekuatan potensial untuk mencapai tujuan-tujuan dan akselerasi pembangunan yang diinginkan.

Akhirnya, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 2006), Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 2006), dan Hari Pahlawan (10 November 2006), di tengah-tengah suasana kehidupan reformasi dan globalisasi, maka keberagaman visi dan interpretasi terhadap perubahan social yang dicita-citakan bersama itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Melainkan merupakan proses kreatif dan realitas yang wajar, sepanjang masih berada dalam konteks integrasi nasional. Sebab, bukankah hal itu sejalan dengan semboyan lambang negara kita “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya: keberagaman dalam kesatuan.

*Vijaya Kusuma, Cipadung
Bandung, 10 Agustus 2006*

